



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta unit kerja mandiri yang ada di bawahnya;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;

Paraf		
	1	2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Paraf			

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019-2024.

Paraf		
	N	J

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Ende.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 (lima) tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
8. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra perangkat daerah Tahun 2019-2024, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Paraf		
	↑	↓

12. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024.
13. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan IKU sebagai standar dalam pengukuran kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan penetapan IKU adalah:
 - a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
 - c. untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup IKU terdiri atas:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah
- (2) IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf		
	4	2

BAB IV

PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN IKU PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) IKU Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari IKU Pemerintah Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah harus selaras.

Pasal 5

Pemilihan dan Penetapan IKU mempertimbangkan :

- a. dokumen perencanaan yang meliputi RPJMD dan Renstra PD;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan penetapan IKU wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (2) Dalam hal IKU ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangan lebih lanjut untuk perbaikan.

BAB V

PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

Indikator Kinerja Utama digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- e. pelaporan Akuntabilitas Kinerja;

Paraf		
	M	J

- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 8

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB VI

PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dalam pengembangan atas pelaksanaan IKU oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU kedalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat.

Paraf		
	4	7

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

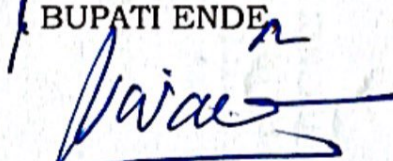
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ende Nomor 34 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal, 7 September 2020

BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 34

Paraf		
	1	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 32 TAHUN 2020
 TANGGAL 7 September 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
 TAHUN 2019-2024

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Pengukuran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data
Tujuan 1 : Masyarakat Ende yang Berprestasi dan Memiliki Moral serta Akhlak Mulia	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$ <p>Keterangan $I_{kesehatan}$: Indeks kesehatan $I_{pendidikan}$: Indeks Pendidikan $I_{pengeluaran}$: Indeks Pengeluaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumber Data Badan Pusat Statistik

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Pengukuran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data
1. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} + \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Keterangan :</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumber Data Badan Pusat Statistik
	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan:</p> <p>HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p> <p>E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>P_i^t = Penduduk usia i pada tahun t</p>	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dinas Pemuda

47

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Pengukuran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data
			dan Olahraga ▪ Sumber Data Badan Pusat Statistik
Tujuan 2 : Masyarakat Ende yang Sehat	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$ <p>Keterangan $I_{\text{kesehatan}}$: Indeks kesehatan $I_{\text{pendidikan}}$: Indeks Pendidikan $I_{\text{kesehatan}}$: Indeks Pengeluaran</p>	▪ PD Penanggung jawab Dinas Kesehatan, RSUD Ende, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ▪ Sumber Data Badan Pusat Statistik
2. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Derajat Angka Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup dihitung melalui pendekatan tidak langsung (<i>indirect estimation</i>), yaitu dengan menggunakan pendekatan Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH)	▪ PD Penanggung jawab Dinas Kesehatan, RSUD Ende, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat,

4 f

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Pengukuran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data
			<p>Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Sumber Data Badan Pusat Statistik
Tujuan 3 Meningkatnya Aktifitas Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	$G_t = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>G_t : Pertumbuhan Ekonomi periode t (triwulan atau tahunan)</p> <p>PDB_t : Produk Domestik Bruto t (berdasarkan harga konstan)</p> <p>PDB_{t-1} : Produk Domestik Bruto satu periode sebelumnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Infomasi, Dinas Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Data Badan Pusat Statistik
3. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (Prime Mover)	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas

11 f

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Pengukuran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data
			Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Infromasi, Dinas Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ▪ Sumber Data Dinas Pariwisata dan Badan Pusat Statistik
	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minuman terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi dari sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minuman}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	▪ PD Penanggung jawab Badan Pendapatan Daerah ▪ Sumber Data Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik
4. Meningkatnya Daya Saing Unggulan (Pengolahan) dan Sektor Potensial (Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan)	Kontribusi Sektor Pengolahan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi dari sektor pengolahan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	▪ PD Penanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ▪ Sumber Data Badan Pusat Statistik

41

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Pengukuran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber Data Badan Pusat Statistik
	Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi dari sektor transportasi dan pergudangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan Sumber Data Badan Pusat Statistik
5. Meningkatnya Investasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB memakai data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik setiap tahunnya pada publikasi Badan Pusat Statistik yaitu Ende dalam Angka	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Komunikasi dan Informasi Sumber Data Badan Pusat Statistik

42

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Pengukuran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data
Tujuan 4 Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Perdagangan Perindustrian Sumber Data Dinas Perikanan dan Badan Pusat Statistik
6. Meningkatnya Produktifitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Kelautan sebagai Sektor Dominan dan Penunjang Pangan Utama	Kontribusi Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi dari sektor pertanian, kelautan dan perikanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Perdagangan Perindustrian Sumber Data Dinas Perikanan dan Badan Pusat Statistik
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	% Angka kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok pangan	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perdagangan Perindustrian Sumber Data Dinas Ketahanan Pangan

4 t

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Pengukuran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data
7. Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumber Data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik
8. Meningkatnya Pengendalian Inflasi	Laju Inflasi	$[(1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2)(1 + \Delta Inf_3)]^{1/T} - 1$ <p>Dimana :</p> <p>ΔInf = Perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya</p> <p>T = Periode pengamatan perubahan nilai inflasi</p> $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>Inf_n = Nilai inflasi pada tahun n</p> <p>$Inf_{(n+1)}$ = Nilai inflasi pada 1 tahun berikutnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Sekretariat Daerah dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumber Data Badan Pusat Statistik

47

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Pengukuran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data
Tujuan 5 Menurunnya Kesenjangan Wilayah	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	$IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 (\frac{f_i}{n})}}{Y}$ <p>Keterangan :</p> <p>Y_i : PDRB perkapita di kecamatan i</p> <p>Y : PDRB perkapita rata-rata kabupaten</p> <p>F_i : Jumlah penduduk di kecamatan i</p> <p>n : Jumlah penduduk di kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kecamatan Sumber Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Rata-rata dari akumulasi semua indikator yang terkait Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan

4 f

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Pengukuran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> Sumber Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
10. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Perdesaan	Tingkat Kemandirian Desa	Skor atau nilai dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kecamatan Sumber Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah dan Laporan Hasil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
	a. Desa Mandiri		
	b. Desa Maju		
	c. Desa Berkembang		
	d. Desa Tertinggal		
	e. Desa Sangat Tertinggal		

11

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Pengukuran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data
Tujuan 6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Penanggung jawab Seluruh Perangkat Daerah dikoordinir oleh Inspektorat ▪ Sumber Data Hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
11. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Opini BPK	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah pada tahun bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Penanggung jawab Seluruh Perangkat Daerah (PD) dikoordinir Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ▪ Sumber Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Laporan Hasil Penilaian AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Penanggung jawab Seluruh Perangkat Daerah (PD) dikoordinir Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten...

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Pengukuran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber Data Dokumen SAKIP Pemerintah Kabupaten Ende dan seluruh OPD serta hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Nilai LPPD	Laporan Hasil Penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Penanggung jawab Seluruh Perangkat Daerah (PD) dikoordinir Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Ende ▪ Sumber Data Dokumen LPPD Pemerintah Kabupaten Ende dan seluruh OPD serta Laporan Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri
12. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Indeks Pelayanan Sosial	Rata-rata dari akumulasi semua indikator yang terkait pelayanan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Penanggung jawab Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

41

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Pengukuran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> Sumber Data Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata dari akumulasi semua indikator yang terkait ketntraman dan ketertiban.	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Sumber Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja
	Indeks Perlindungan Perempuan dan Anak	Rata-rata dari akumulasi semua indikator yang terkait perlindungan perempuan dan anak.	<ul style="list-style-type: none"> PD Penanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumber Data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4 t

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ENDE

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1.	Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Persentase guru SD yang memenuhi standar kompetensi	$\frac{\text{Jumlah guru SD yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh guru SD}} \times 100\%$
		Persentase guru SMP yang memenuhi standar kompetensi	$\frac{\text{Jumlah guru SMP yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh guru SMP}} \times 100\%$
		Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh tenaga kependidikan}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya akses pendidikan non formal dan Informal serta pendidikan luar sekolah	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah siswa jenjang TK/RA/ Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4-6 tahun}} \times 100\%$
		Angka melek huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya prestasi peserta didik dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis	Rata-rata nilai USBN	$\frac{\text{Jumlah rata-rata pelajaran USBN SD/MI se-Kabupaten Ende}}{\text{Jumlah mata pelajaran USBN}} \times 100\%$
		Rata-rata nilai UN	$\frac{\text{Jumlah rata-rata pelajaran UN SMP/MTs se-Kabupaten Ende}}{\text{Jumlah mata pelajaran UN}} \times 100\%$
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$

42

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Pengukuran
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$
		Jumlah prestasi yang diraih oleh siswa/i di tingkat provinsi dan kabupaten	Jumlah prestasi yang diraih siswa/i di tingkat provinsi dan kabupaten pada tahun n
4.	Meningkatnya pelestarian terhadap budaya lokal	Persentase budaya lokal yang dilestasikan	$\frac{\text{Jumlah budaya lokal yang dilestarikan}}{\text{Jumlah budaya lokal yang dimiliki daerah}} \times 100\%$
		Jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan dalam satu tahun	Jumlah kegiatan festival
2. Dinas Kesehatan			
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan indikator SPM Bidang Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah total capaian indikator SPM Bidang Kesehatan}}{\text{Jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan}} \times 100\%$
		Cakupan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten}} \times 100\%$
		Cakupan Fasilitas Kesehatan terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas terakreditasi}}{\text{Jumlah seluruh Puskesmas}} \times 100\%$
		Operasional RS Pratama	Beroperasinya Rumah Sakit Pratama Ya/Tidak

11

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
		Persentase Penurunan Stunting	$\frac{\text{Balita stunting (pendek dan sangat pendek)}}{\text{Balita yang diukur indek panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U)}} \times 100\%$
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase dinas yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah total capaian indikator kinerja administrasi perkantoran}}{\text{Jumlah indikator kinerja terkait administrasi perkantoran}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	Persentase jalan dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang saluran drainase}} \times 100\%$
		Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	$\frac{\text{Kawasan yang terbangun}}{\text{Kawasan rawan longsor}} \times 100\%$
		Persentase ketersediaan database Bidang ke PU-an	Jumlah dokumen data base ke PU-an yang tersedia
		Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam keadaan baik dan layak pakai	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak pakai}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan yang ada}} \times 100\%$

4 1

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas daerah irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Luas daerah irigasi seluruhnya}} \times 100\%$
		Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga terakses air minum}}{\text{Jumlah Rumah Tangga seluruhnya}} \times 100\%$
		Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	$\frac{\text{Luas sempadan sungai yang dipakai bangunan liar}}{\text{Luas sempadan sungai yang ada}} \times 100\%$
		Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	$\frac{\text{Luas daerah yang tergenang}}{\text{Luas daerah rawan genangan berpotensi tergenang}} \times 100\%$
		Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan lingkungan seluruhnya}} \times 100\%$
3.	Tercapainya tertib ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	Jumlah Dokumen Tata Ruang yang harus Disediakan
		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber-IMB}}{\text{Jumlah bangunan seluruhnya}} \times 100\%$
		Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana peruntukan dalam RTRW}} \times 100\%$

12

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	$\frac{\text{Luas RTH publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luasan RTH yang seharusnya tersedia di wilayah kota atau kawasan perkotaan}} \times 100\%$
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			
1.	Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
2.	Peningkatan jumlah luasan pemukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	$\frac{\text{Luasan pemukiman yang tertangani}}{\text{Luas pemukiman kumuh}} \times 100\%$
3.	Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana alam/sosial	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni di suatu wilayah kerja tertentu}}{\text{Jumlah seluruh rumah di suatu wilayah kerja tertentu pada Tahun n}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya persentase desa yang terakses listrik	Persentase desa yang terakses listrik	$\frac{\text{Jumlah desa yang terakses listrik}}{\text{Jumlah desa seluruhnya pada tahun n}} \times 100\%$
5.	Meningkatnya sistem sanitasi lingkungan di perumahan warga	Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani air limbah memadai}}{\text{Jumlah Penduduk Seluruhnya}} \times 100\%$
6.	Meningkatnya sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah	Persentase tanah milik pemda yang dilakukan sertifikasi	$\frac{\text{Luas tanah milik pemda yang tersertifikasi}}{\text{Luas Tanah Milik Pemda Seluruhnya}} \times 100\%$

4 1

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga			
1.	Meningkatnya pembinaan kegiatan olahraga	Cakupan pembinaan kegiatan olahraga	$\frac{\text{Jumlah total capaian indikator kinerja terkait kegiatan olahraga}}{\text{Jumlah indikator kinerja terkait kegiatan olahraga}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana olahraga		
3.	Meningkatnya pembinaan kepemudaan	Cakupan pembinaan generasi muda	$\frac{\text{Jumlah total capaian indikator kinerja terkait generasi muda}}{\text{Jumlah indikator kinerja terkait generasi muda}} \times 100\%$
6. Satuan Polisi Pamong Praja			
1.	Optimalisasi keamanan dan perlindungan masyarakat	Cakupan keamanan, ketertiban dan keindahan	$\frac{\text{Jumlah total capaian indikator kinerja terkait keamanan, ketertiban dan keindahan}}{\text{Jumlah indikator kinerja terkait keamanan, ketertiban dan keindahan}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat yang patuh dan taat terhadap ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan metode pelayanan humanis dan persuasif	$\frac{\text{Jumlah total capaian indikator kinerja terkait metode pelayanan humanis dan persuasif}}{\text{Jumlah indikator kinerja terkait metode pelayanan humanis dan persuasif}} \times 100\%$
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.	Meningkatkan pelayanan PPKS	Cakupan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	$\frac{\text{Jumlah total capaian indikator kinerja terkait PPKS}}{\text{Jumlah indikator kinerja terkait PPKS}} \times 100\%$

47

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
2.	Indeks pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Cakupan perlindungan perempuan dan anak	$\frac{\text{Jumlah total capaian indikator kinerja terkait perlindungan perempuan dan anak}}{\text{Jumlah indikator kinerja terkait perlindungan perempuan dan anak}} \times 100\%$
8. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
1.	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)}} \times 100\%$
9. Dinas Ketahanan Pangan			
1.	Meningkatnya Ketersediaan dan penanganan rawan pangan	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Total produksi (Ton EB)}}{\text{Total kebutuhan (Ton EB)}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya hasil uji produk Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada pelaku utama dan pelaku usaha	$\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji}}{\text{Jumlah sampel yang wajib diuji}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya konsumsi dan penganekaragaman pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumen	Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok pangan
4.	Meningkatnya koordinasi distribusi dan akses pangan	Penguatan cadangan pangan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan masyarakat}}{\text{Jumlah cadangan pangan kabupaten}} \times 100\%$
10. Dinas Lingkungan Hidup			
1.	Berkurangnya jumlah timbunan sampah pada sumbernya	Persentase penanganan sampah	$\frac{\text{Jumlah sampah yang ditangani}}{\text{Jumlah timbunan sampah di perkotaan}} \times 100\%$

42

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
		Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	$\frac{\text{Jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti Bank sampah induk, pusat daur ulang pengomposan dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan}}{\text{Jumlah sampah yang dihasilkan}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya pelayanan penanganan sampah	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	$\frac{\text{Jumlah area pelayanan pengelolaan sampah (Km}^2\text{/Ha)}}{\text{Jumlah area kabupaten}} \times 100\%$
3.	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah ketaatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH, PUULH dari ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende yang ditangani}}{\text{Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH, PUULH dari ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah}} \times 100\%$
		Cakupan pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
		Peningkatan Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	Indeks Kualitas Air
		Peningkatan Indeks Kualitas Udara	IKU = $100 - [50/0,9 \times (I_{\text{eu}} - 0,1)]$

4 +

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administasi kependudukan	Cakupan layanan kependudukan dan pencatatan sipil	$\frac{\text{Jumlah total capaian indikator kinerja terkait layanan kependudukan dan pencatatan sipil}}{\text{Jumlah indikator kinerja terkait layanan kependudukan dan pencatatan sipil}} \times 100\%$
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1.	Kemandirian desa	Menurunnya status desa sangat tertinggal dan meningkatnya status desa maju	Jumlah desa sangat tertinggal yang meningkat status ke desa maju pada tahun n
2.	Keberdayaan ekonomi keberdayaan lembaga	Meningkatnya keberdayaan lembaga ekonomi	$\frac{\text{Jumlah BUMDes yang dibentuk}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$
		Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	$\frac{\text{Jumlah lembaga yang dibina}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	$\frac{\text{Jumlah kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Desa}}{\text{Jumlah yang wajib hadir}} \times 100\%$
		Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	$\frac{\text{Jumlah desa yang dibina}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$
		Meningkatnya peran perempuan di pedesaan	$\frac{\text{Jumlah PKK yang aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100\%$
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1.	Mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui pengendalian angka kelahiran	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	$\text{TFR} = 5 \sum_{i=1}^7 = 1 \text{ ASFR } i$

4 ↓

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
2.	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (<i>Contraceptive Prevalence Rate/CPR</i>)	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>Contraceptive Prevalence Rate/CPR</i>)	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah seluruh PUS yang ada}} \times 100\%$
3.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	$\frac{\text{Jumlah PUS Unmeet Need}}{\text{Jumlah seluruh PUS yang ada}} \times 100\%$
4.	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	Angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR)	$ASFR_i = \frac{bi}{pif} \times K$
14. Dinas Perhubungan			
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Persentase Dinas yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan yang baik	$\frac{\text{Jumlah total capaian indikator kinerja terkait administrasi perkantoran}}{\text{Jumlah indikator kinerja terkait administrasi perkantoran}} \times 100\%$
2.	Menurunkan Tngkat Kecelakaan Transportasi Darat	Persentase ketersediaan Rambu-rambu	$\frac{\text{Jumlah rambu-rambu yang sudah ada pada Tahun n}}{\text{Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$
		Persentase ketersediaan Marka	$\frac{\text{Jumlah marka yang sudah ada pada Tahun n}}{\text{Jumlah marka yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$
		Persentase ketersediaan Guard Drill	$\frac{\text{Jumlah Guard Drill yang sudah ada pada Tahun n}}{\text{Jumlah Guard Drill yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$
3.	Terpenuhinya sarana transportasi (darat, laut dan udara) yang memadai	Persentase layanan angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100\%$

4 1

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
		Persentase koordinasi, pembinaan dan pengawasan layanan Angkutan laut	$\frac{\text{Jumlah koordinasi, pembinaan dan pengawasan layanan Angkutan Laut yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah koordinasi, pembinaan dan pengawasan layanan Angkutan Laut seharusnya dilaksanakan}} \times 100\%$
		Persentase koordinasi, pembinaan dan pengawasan layanan Angkutan Udara	$\frac{\text{Jumlah koordinasi, pembinaan dan pengawasan layanan Angkutan Udara yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah koordinasi, pembinaan dan pengawasan layanan Angkutan Udara seharusnya dilaksanakan}} \times 100\%$
4.	Meningkatkan tertib laik kendaraan angkutan umum	Rasio ijin trayek	$\frac{\text{Jumlah penduduk Tahun } n}{\text{Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan Tahun } n} \times 100\%$
		Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum	$\frac{\text{Jumlah Angkutan Umum yang melakukan uji KIR pada Tahun } n}{\text{Jumlah Angkutan Umum pada Tahun } n} \times 100\%$
15. Dinas Komunikasi dan Informatika			
1.	Terwujudnya pelayanan aparatur dalam bidang informasi dan komunikasi serta statistik dan persandian	Cakupan layanan telekomunikasi	$\frac{\text{Luas wilayah yang tercoverage}}{\text{Jumlah wilayah seluruhnya}} \times 100\%$
2.	Tersedianya regulasi/kebijakan daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian, statistik dan komunikasi informasi		

4 ↓

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
3.	Terwujudnya pelayanan pemerintah yang berbasis elektronik		
4.	Terwujudnya Perangkat Daerah dan masyarakat yang paham		
5.	Tersedianya data dan Mengelola data statistik sektoral dalam perumusan kebijakan pembangunan	Penyediaan data statistik daerah	$\frac{\text{Jumlah data yang disediakan}}{\text{Jumlah seluruh data yang dibutuhkan}} \times 100\%$
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1.	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya jumlah UKM yang mendapatkan akses permodalan	Persentase UKM yang mendapatkan layanan akses permodalan	$\frac{\text{Jumlah UKM yang mendapatkan permodalan}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya jumlah UKM yang dibina	Persentase UKM yang Dibina	$\frac{\text{Jumlah UKM yang Dibina}}{\text{Jumlah Seluruh UKM}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya jumlah UKM mandiri	Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri	$\frac{\text{Jumlah UMKM mandiri}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}} \times 100\%$
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu			
1.	Mengembangkan sistem data dan informasi potensi unggulan daerah yang bernilai investasi	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Jumlah investor pada tahun n
2.	Meningkatnya nilai realisasi investasi dan jumlah investor	Realisasi investasi (PMDN/PMA)	Nilai investasi pada tahun n
3.	Mewujudkan pelayanan perijinan dan non perijinan yang berkualitas, efektif dan efisien	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan yang diperoleh	Indeks kepuasan masyarakat

4 f

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
1.	Meningkatnya minat baca masyarakat dan sumber daya perpustakaan	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah selama 1 tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yang seharusnya dilayani}} \times 100\%$
2.	Peningkatan koleksi perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah selama 1 tahun}}{\text{Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah}} \times 100\%$
		Persentase ketersediaan perpustakaan desa dan kelurahan	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan perpustakaan desa dan kelurahan}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan desa dan kelurahan	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan desa dan kelurahan}}{\text{Jumlah koleksi judul buku yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$
3.	Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan pustakawan	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	$\frac{\text{Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai}} \times 100\%$
4.	Peningkatan sistem administrasi dan pengembangan SDM kearsipan perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$

12

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yang dilaksanakan pada tahun n}}{\text{Jumlah rencana kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan}} \times 100\%$
5.	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip	Persentase desa dan kelurahan yang mengelola arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$
19. Dinas Perikanan			
1.	Meningkatnya produktifitas dan nilai tambah sektor kelautan	Cakupan nilai produksi perikanan	$\frac{\text{Jumlah total capaian indikator terkait perikanan}}{\text{Jumlah indikator terkait perikanan}} \times 100\%$
20. Dinas Pariwisata			
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Ende	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan
2.	Meningkatnya lama tinggal wisatawan (<i>length of stay</i>)	Rata-rata lama tinggal wisatawan	$\frac{\text{Jumlah hari menginap}}{\text{Jumlah tamu yang menginap}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Penerimaan sektor pariwisata	$\frac{\text{Jumlah PAD sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PAD}} \times 100\%$
21. Dinas Pertanian			
1.	Meningkatnya produksi, produktivitas, mutu dan daya saing produk guna meningkatkan pendapatan petani dan ketahanan pangan masyarakat	Cakupan nilai produksi tanaman pangan	$\frac{\text{Produksi padi atau bahan pangan lainnya}}{\text{Luas areal tanaman padi atau bahan pangan lainnya}} \times 100\%$
		Cakupan nilai produksi tanaman hortikultura	Produksi hortikultura (a - p) pada tahun n

47

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
2.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya alam berbasis kawasan	Cakupan nilai produksi tanaman perkebunan	$\frac{\text{Jumlah produksi tanaman perkebunan pada tahun n} - \text{produksi pada tahun n-1}}{\text{Jumlah produksi tanaman perkebunan pada tahun n-1}} \times 100\%$
		Cakupan nilai produksi peternakan	$\frac{\text{Jumlah produksi ternak pada tahun n} - \text{jumlah produksi ternak pada tahun n-1}}{\text{Jumlah produksi ternak pada tahun n-1}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya PAD yang dihasilkan melalui pengelolaan sumber daya SKPD, pajak, dan retribusi-retribusi	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/peternakan terhadap peningkatan PAD	$\frac{\text{Jumlah (Rp) kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB pada tahun n}}{\text{PDRB pada tahun n}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia pertanian serta kapasitas kelembagaan tani, sehingga dapat menjalankan usaha taninya dengan baik, mempunyai akses yang baik terhadap pasar dan permodalan serta memiliki posisi tawar yang tinggi	Cakupan bina kelompok tani yang meningkat statusnya	$\frac{\text{Jumlah kelompok tani yang mendapatkan binaan dan meningkat statusnya pada tahun n}}{\text{Jumlah kelompok tani yang ada}} \times 100\%$
22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
1.	Tumbuh dan berkembang sektor perdagangan dan perindustrian	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	$\frac{\text{Jumlah kelompok pedagang/pengusaha informal yang mendapat binaan/bantuan}}{\text{Jumlah kelompok pedagang/pengusaha yang ada}} \times 100\%$

4 f

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
		Cakupan bina kelompok pengrajin dan industri kecil dan menengah	$\frac{\text{Jumlah kelompok pengrajin dan IKM yang mendapat binaan/bantuan}}{\text{Jumlah kelompok pengrajin dan IKM yang ada}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya akses informasi perdagangan komoditi	Nilai usaha perdagangan (volume antar pulau)	$\frac{\text{Jumlah realisasi nilai usaha perdagangan (volume antar pulau)}}{\text{Target nilai usaha perdagangan antar pulau}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya tertib ukur dan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa	Cakupan pembinaan konsumen	$\frac{\text{Jumlah sekolah, PT dan kecamatan yang menjadi lokasi binaan}}{\text{Total sekolah, PT dan kecamatan yang ada}} \times 100\%$
		Cakupan pengawasan perdagangan	$\frac{\text{Jumlah toko/kios dan distributor yang diawasi}}{\text{Total toko/kios dan distributor yang ada}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PAD	Persentase target retribusi pasar	$\frac{\text{Jumlah realisasi retribusi pasar}}{\text{Target retribusi pasar}} \times 100\%$
23. Sekretariat Daerah			
1.	Meningkatnya Pengendalian inflasi serta meningkatnya Birokrasi yang bersih akuntabel, efektif dan efisien	Laju inflasi	$[(1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2)(1 + \Delta Inf_3)]^{1/T} - 1$ <p>Dimana :</p> <p>ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya</p> <p>T = periode pengamatan perubahan nilai inflasi</p>

4 f

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
			$\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>Inf_n = nilai inflasi pada tahun n</p> <p>$Inf_{(n+1)}$ = nilai inflasi pada 1 tahun berikutnya</p>
		Nilai AKIP	Laporan Hasil Penilaian AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Nilai LPPD	Laporan Hasil Penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat
24. Sekretariat DPRD			
1.	Penguatan kapasitas lembaga DPRD	Peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disetujui bersama antara pemerintah dan DPRD}}{\text{Jumlah Perda yang diajukan oleh DPRD dan/atau pemerintah}} \times 100\%$
		Persentase pencapaian Propemperda	$\frac{\text{Jumlah Perda yang dibahas dan disetujui bersama berdasarkan Propemperda}}{\text{Jumlah Perda yang direncanakan berdasarkan Propemperda}} \times 100\%$
		Kegiatan reses yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan pada tahun n}}{\text{Jumlah kegiatan reses yang seharusnya dilaksanakan pada tahun n}} \times 100\%$

47

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
		Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan yang seharusnya dilaksanakan}} \times 100\%$
25. Inspektorat			
1.	Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa	Jumlah temuan BPK	Jumlah temuan BPK pada tahun n
		Persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi temuan hasil pengawasan pada tahun n-1}} \times 100\%$
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, akuntabel dan berkelanjutan	Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran	$\frac{\text{Jumlah program yang dianggarkan (APBD)}}{\text{Jumlah program yang direncanakan (RKPD)}} \times 100\%$
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat waktu/Tidak tepat waktu
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Hasil Opini BPK
		Kepatuhan terhadap implementasi transaksi non tunai	$\frac{\text{Total realisasi belanja non tunai}}{\text{Total realisasi belanja keseluruhan}} \times 100\%$

11

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
		Ketepatan waktu penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tepat waktu/Tidak tepat waktu
2.	Terlaksananya koordinasi dan meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan daerah	Penyelesaian administrasi pencairan dana tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SPM yang diterbitkan SP2D tepat waktu}}{\text{Jumlah SPM yang diajukan dan benar}} \times 100\%$
28. Badan Pendapatan Daerah			
1.	Meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	Rasio Peningkatan Pendapatan Daerah	Besarnya pendapatan awal dikali dengan rata-rata kenaikan pendapatan dan retribusi
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
1.	Terpenuhinya kebutuhan ASN yang professional dan bermanfaat	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	$\frac{\text{Jumlah pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural}}{\text{Jumlah total jabatan struktural}} \times 100\%$
		Persentase CPNSD yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar	$\frac{\text{Jumlah CPNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar}}{\text{Jumlah CPNSD yang direncanakan mengikuti diklat dasar}} \times 100\%$
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Rata-rata persentase realisasi ASN yang mengikuti diklat teknis fungsional dan pendidikan formal
		Persentase jabatan struktural pada instansi pemerintah yang terisi	$\frac{\text{Jumlah jabatan struktural yang terisi}}{\text{Total jumlah jabatan struktural pada instansi pemerintah}} \times 100\%$
2.	Tersedianya pejabat fungsional dan pejabat pelaksana secara merata pada OPD	Persentase pelayanan urusan kepegawaian daerah	Rata-rata persentase realisasi urusan kepegawaian

47

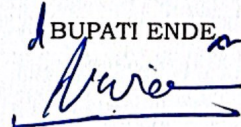
No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
3.	Tersedianya informasi dan manajemen kepegawaian berbasis teknologi		
4.	Terwujudnya pelayanan prima kepegawaian		
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks keamanan dan ketertiban	$\frac{\text{Jumlah total capaian kinerja indikator keamanan dan ketertiban}}{\text{Jumlah indikator keamanan dan ketertiban}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik	Cakupan partisipasi politik masyarakat	$\frac{\text{Jumlah total capaian kinerja indikator partisipasi politik masyarakat}}{\text{Jumlah indikator partisipasi politik masyarakat}} \times 100\%$
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1.	Meningkatnya pencegahan dan pengurangan resiko bencana	Indeks ketahanan daerah terhadap bencana	Rata-rata nilai dari 71 indikator ketahanan daerah, dimana Level 1 rata-rata nilai 0-20, Level 2 rata-rata nilai 20-40, Level 3 rata-rata nilai 40-60, Level 4 rata-rata nilai 60-80 dan Level 5 rata-rata nilai 80-100
		Penyediaan rencana penanggulangan kebencanaan	Jumlah rencana penanggulangan kebencanaan yang disusun pada tahun n
		Persentase kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah institusi siaga bencana}}{\text{Jumlah institusi yang ada (PD, desa, kelurahan, SD, SMP, SMA, BUMN/D)}} \times 100\%$

4 f

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Pengukuran
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$
32. Rumah Sakit Umum Daerah			
1.	BLUD RSUD Ende mandiri dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat	Cakupan pelayanan RSUD Ende	$\frac{\text{Jumlah total capaian indikator pelayanan RSUD Ende}}{\text{Jumlah indikator pelayanan RSUD Ende}} \times 100\%$
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana level 1 yang tersedia pada instalasi IGD}}{\text{Jumlah sarana prasarana level 1 pada instalasi IGD sesuai standar}} \times 100\%$
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	$\frac{\text{Jumlah pasien dengan resiko terinfeksi HIV dilayani}}{\text{Jumlah kunjungan pasien dengan resiko terinfeksi HIV}} \times 100\%$
		Bed Occupancy Rate (BOR)	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan}}{\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{jumlah hari periode}} \times 100\%$
		Average Length of Stay (ALOS)	$\frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 100\%$
		Bed Turn Over (BTO)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}} \times 100\%$
		Turn Over Interval (TOI)	$\frac{(\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{jumlah hari periode}) - \text{jumlah hari perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 100\%$

4 f

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Pengukuran
		Gross Death Rate (GDR)	$\frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times 100\%$
		Net Death Rate (NDR)	$\frac{\text{Jumlah pasien mati >48 jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times 100\%$
33. Kecamatan			
1.	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Persentase kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan baik	$\frac{\text{Jumlah total capaian indikator pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat}}{\text{Jumlah indikator pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$


 BUPATI ENDE
 DJAFAR H. ACHMAD